



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Pemerintahan Jepang dalam Mengatasi Ancaman

Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku Sejak Tahun

2012

Skripsi

Oleh

Hansel Loanza Kamajaya

6091801171

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Pemerintahan Jepang dalam Mengatasi Ancaman

Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku Sejak Tahun

2012

Skripsi

Oleh

Hanssel Loanza Kamajaya

6091801171

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hanssel Loanza Kamajaya
Nomor Pokok : 6091801171
Judul : Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Ancaman Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku Sejak Tahun 2012

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 18 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

:

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

:

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanssel Loanza Kamajaya

NPM : 6091801171

Progam Studi : Ilmu Hubungan internasional

Judul : Upaya Pemerintahan Jepang dalam Mengatasi Ancaman Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku sejak tahun 2012

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 05 Januari 2022,



Hanssel Loanza Kamajaya

ABSTRAK

Nama : Hanssel Loanza Kamajaya

NPM : 6091801171

Judul : Upaya Pemerintahan Jepang dalam Mengatasi Ancaman Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku sejak tahun 2012

Jepang merupakan merupakan salah satu negara dalam dunia yang memiliki pertumbuhan perekonomian sangat pesat di era pasca-Perang Dingin. Namun, negara tersebut juga merupakan salah satu negara di dunia yang tidak memiliki kapabilitas militer setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II dikarenakan adanya Artikel 9. Keadaan tersebut membuat Jepang semakin sulit untuk menjaga kestabilan dan keamanan dalam regional Asia Timur, lebih tepatnya pada area Laut Tiongkok Timur dimana Kepulauan Senkaku terletak. Kestabilan wilayah tersebut lebih diperparah dengan adanya peningkatan perekonomian Tiongkok yang diiringi dengan peningkatan kapabilitas angkatan lautnya dengan dioperasikannya kapal-kapal induk kedalam angkatan laut tersebut. Peningkatan kapabilitas angkatan laut Tiongkok, membuat negara tersebut semakin berani dan percaya diri untuk memperlihatkan kekuatannya, serta memakai kapabilitas yang dimilikinya untuk mengejar kepentingan nasional mereka.

Beranjak dari pernyataan-pernyataan tersebut, maka penelitian ini menarik pertanyaan penelitian *Bagaimana strategi Jepang untuk mengamankan wilayah Kepulauan Senkaku dari ancaman Tiongkok*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian akan menggunakan teori *Maritime Strategy in Peacetime*. Melalui teori tersebut terlihat upaya Jepang dalam mengimbangi kapabilitas yang dimiliki Tiongkok, yaitu dengan merubah postur kebijakan luar negeri yang dimilikinya menjadi lebih proaktif, meningkatkan kapabilitas pasukan pertahanannya secara domestik, dan mempererat hubungan yang dimiliki oleh negara tersebut dengan Amerika Serikat. Terlihat bahwa strategi yang Jepang ambil tidak hanya bergantung kepada kekuatan eksternal, namun juga berusaha untuk meningkatkan kekuatan internalnya.

Kata Kunci: Jepang, Tiongkok, Kepulauan Senkaku, *Maritime Strategy in Peacetime*, Angkatan Laut, Keamanan Maritim

ABSTRACT

Nama : Hanssel Loanza Kamajaya

NPM : 6091801171

Judul : Japanese Government's Effort Countering China's Threats in Senkaku Islands Area Since 2012

Japan is one of the countries in the world that has a rapid economic growth in the post-Cold War era. However, this country is also one of the countries in the world that does not have military capability after its defeat in World War II due to Article 9. This situation makes it increasingly difficult for Japan to maintain stability and security in the East Asia region, more precisely in the East China Sea area, where the Senkaku Islands are located. The stability of the region is further exacerbated by an increase in China's economy which accompanied by an increase in its naval capability by operating aircraft carriers into the navy. The increase in China's naval capability has made the country more courageous and confident to show its strength, and use its capabilities to pursue their national interests.

Moving from these statements, this study draws a research question: How did Japan strategize to secure the Senkaku Islands region from Chinese threats. To answer this research question, this research will use the theory of Maritime Strategy in Peacetime. Through this theory, Japan's efforts to balance China's capabilities could be seen, namely by changing its foreign policy posture to be more proactive, increasing the capabilities of its defense forces domestically, and strengthening the relationship that the country has with the United States. It could be seen that the strategy which Japan took did not only depend on external forces, but also sought to increase its internal strength.

Keywords: *Japan, China, Senkaku Islands, Maritime Strategy in Peacetime, Navy, Maritime Security*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis penatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Upaya Pemerintahan Jepang dalam Mengatasi Ancaman Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku sejak tahun 2012** dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan ini dibentuk untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan memiliki ketidaksempurnaan dalam beberapa pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan adanya kritik dan masukan-masukan yang ditujukan kepada penulis, baik di masa penulisan, maupun di masa setelah penulisan selesai sehingga penelitian ini dapat berkembang dan menjadi lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik, saran, dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi kepada:

1. Mas Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik dan saran terhadap penulisan skripsi, serta mengarahkan penulisan skripsi sampai selesai.
2. Kedua orangtua saya, Budiman Kamajaya dan Pri Ay Ermie Djaja yang memiliki kepercayaan akan penyelesaian penulisan dalam waktu yang tepat dan menyemangati saya dalam pengerjaan.
3. Adik saya, Matthew Kamajaya yang telah menemani saya dalam proses pengerjaan di luar rumah dan memberikan rekomendasi tempat-tempat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Seluruh anggota pengajar dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan pengajaran terkait studi Hubungan Internasional.
5. Teman-teman yang telah menemani saya saat di Bandung dalam proses pengerjaan skripsi, terutama untuk Ruby Adrian, Katherine Agatha, Stevanus Epen, Audre Augurius, Juan Wangsa, Archangela Rachel, Ruben Manik, Alfonsus Dion, Mohammad Rasya, dan Kevin Izzan yang telah memberikan hiburan di masa-masa sulit pengerjaan.
6. Para anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Airsoftgun dan para anggota komunitas Airsoftgun yang tidak memungkinkan untuk disebutkan

seluruhnya yang menjadi pelampiasan rasa penat saya dikala keadaan penulisan sedang mengalami masa sulit.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 KAJIAN LITERATUR	8
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	13
1.5.1 Maritime Strategy in Peacetime	13
1.5.2 Konsep Ancaman Stephen M. Walt	16
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	17
1.6.1 Metode Penelitian	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	17
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	18
BAB 2 KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG, KAPABILITAS MILITER TIONGKOK, DAN GEOPOLITIK DALAM KEPULAUAN SENKAKU	20

2.1	KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DI ERA PEMERINTAHAN SHINZO ABE	20
2.2	ADMINISTRASI JEPANG ATAS KEPULAUAN SENKAKU	23
2.3	PERSEPSI ANCAMAN JEPANG TERHADAP TIONGKOK.....	28
2.3.1	Kekuatan Agregat	28
2.3.2	Letak Geografis Jepang dan Tiongkok	30
2.3.3	Kapabilitas Angkatan Laut Tiongkok.....	30
2.3.4	Intensi Tiongkok.....	35
2.4	KLAIM TIONGKOK ATAS KEPULAUAN SENKAKU	39
BAB 3 STRATEGI JEPANG DALAM MENGAMANKAN KEPULAUAN SENKAKU DARI ANCAMAN TIONGKOK		
3.1	TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN.....	42
3.1.1	PRIORITAS UTAMA DAN SEKUNDER JEPANG	42
3.1.2	PERSEBARAN PASUKAN PERTAHANAN MARITIM JEPANG	45
3.1.3	INFERIORITAS KAPABILITAS PASUKAN PERTAHANAN MARITIM JEPANG.....	48
3.2	TAHAP PELAKSANAAN.....	54
3.2.1	UPAYA JEPANG MENGATASI SUPERIORITAS KAPABILITAS MILITER TIONGKOK	54
3.2.2	UPAYA JEPANG MENGATASI INTRUSI DI WILAYAH KEPULAUAN SENKAKU	58
3.2.3	ALIANSI PERTAHANAN JEPANG DENGAN AMERIKA SERIKAT	
	62	
BAB 4 KESIMPULAN.....		
		66
DAFTAR PUSTAKA		
		69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Kapabilitas Angkatan Laut Tiongkok	33
Tabel 2.2 Peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Tiongkok (milyar Yuan).....	34
Tabel 2.3 Alokasi Dana Pertahanan Tiongkok (milyar Yuan).....	34
Tabel 2.4 Peningkatan Divisi Aviasi Angkatan Laut Tiongkok	35
Tabel 3.1 Perkembangan Kapabilitas Angkatan Laut Jepang 2012-2021	50
Tabel 3.2 Perbandingan Total Angkatan Laut Jepang Dengan Tiongkok 2012-2021.....	50
Tabel 3.3 Perkembangan Kapabilitas Divisi Aviasi Angkatan Laut Jepang 2012-2021.....	52
Tabel 3.4 Perbandingan Total Kapabilitas Divisi Aviasi Angkatan Laut Jepang dan Tiongkok 2012-2021	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Surat apresiasi Tiongkok Kepada penduduk pulau Ishigaki pada tahun 1920.....	25
Gambar 2.2 Grafik Intrusi Kapal-Kapal Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku	37
Gambar 3.1 Peta Persebaran Pangkalan Maritim Jepang Tahun 2014	46
Gambar 3.2 Peta Persebaran Pangkalan Maritim Jepang Tahun 2021	46

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
AS	: Amerika Serikat
AU	: Angkatan Udara
ECAFE	: Economic Comission for Asia and the Far East
FOIP	: Free and Open Indo-Pacific
FONOP	: Free of Navigation Operations
LDP	: Liberal Democratic Party
NDPG	: National Defense Posture Guidelines
NSS	: National Security Strategy
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
SAM	: Surface to Air Missile
SDA	: Sumber Daya Alam
STOVL	: Short Take-off and Vertical Landing
UNIDO	: United Nations Industrial Development Organization
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kepulauan Senkaku merupakan sebuah kelompok kepulauan yang terletak di daerah Barat Daya dari Tokyo, Jepang. Kepulauan tersebut terdiri dari lima pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah Laut Tiongkok Timur, yaitu Uotsuri, Kuba, Kitako-jima, Taisho, Minami- Kojima, dan tiga bebatuan yaitu Okinokitaiwa, Okinominamiwa, dan Tobise.¹ Kelompok pulau-pulau yang terletak di bagian Barat Daya Jepang tersebut memiliki jarak 92 mil laut (170 km) dari pulau terujung Selatan Jepang, Ishigaki dan 221 mil laut (410 km) dari Okinawa.² Walaupun kepulauan tersebut merupakan kepulauan tak berpenghuni, namun wilayah di sekitarnya memiliki kekayaan alam yang cukup banyak.

Menurut penelitian pertama yang dilakukan oleh *Economic Commission for Asia and the Far East* (ECAFE) pada tahun 1968, wilayah sekitar Kepulauan Senkaku, memiliki kemungkinan akan adanya cadangan minyak dan gas bumi.³ ECAFE melakukan penelitian kembali pada tahun 1994 terhadap wilayah sekitar Kepulauan Senkaku. Penelitian kedua tersebut membuahkan sebuah hasil yang menguntungkan bagi Jepang, karena penelitian kedua tersebut membuktikan akan

¹ Koichi Sato. 2019. "The Senkaku Islands Dispute: Four Reasons of the Chinese Offensive - a Japanese View." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 8 (1): 52. <https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1626567>.

² "Senkaku Islands Information." Ministry of Foreign Affairs of Japan. Accessed November 10, 2021. https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/senkaku/page1we_000009.html.

³ Koichi Sato. The Senkaku Islands Dispute: Four Reasons of the Chinese Offensive – a Japanese View. 2019. *Op cit.* 54

adanya cadangan minyak dan gas bumi dengan angka yang cukup signifikan, yaitu sebesar 500 juta kiloton.⁴

Selain akan adanya bukti bahwa dalam wilayah Kepulauan Senkaku terdapat cadangan minyak dan gas alam dengan angka yang cukup signifikan, perairan wilayah kepulauan tersebut juga kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) maritim. Kekayaan akan SDA maritim dalam wilayah Kepulauan Senkaku dibuktikan dengan pemanfaatan perairan sekitar Kepulauan Senkaku oleh Jepang untuk memproduksi *katsuobushi* (bonito kering) salah satu makanan utama masyarakat Jepang sejak tahun 1896 sampai dimulainya Perang Dunia II.⁵

Setelah kekalahannya di akhir Perang Dunia II, Jepang memberikan kontrol efektif Kepulauan Senkaku kepada Amerika Serikat yang digunakan sebagai tempat lapangan tembak dan tempat untuk mengetes bom-bom yang dimiliki oleh AS.⁶ Kepulauan tersebut beserta wilayahnya berada di bawah administrasi Amerika Serikat selama 25 tahun sejak tahun 1945 sampai 1971 ketika dibentuknya dan disetujuinya Perjanjian San Francisco dan Perjanjian Pengembalian Okinawa pada tahun 1972.⁷ Sejak pembentukan perjanjian-perjanjian tersebut, kontrol efektif akan Kepulauan Senkaku beserta wilayahnya kembali menjadi milik Jepang dan sampai saat ini wilayah kepulauan tersebut masih berada di bawah administrasi pemerintahan Jepang.

⁴ *Ibid.* hlm. 56-57

⁵ *Ibid.* hlm. 54-55

⁶ Tadashi Ikeda, "Getting Senkaku History Right," *The Diplomat*, November 26, 2013, <https://thediplomat.com/2013/11/getting-senkaku-history-right/>.

⁷ *Ibid.*

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1.2.1 Deskripsi Masalah

Meskipun sudah ada perjanjian-perjanjian yang mengatakan bahwa Kepulauan Senkaku serta wilayahnya merupakan milik Jepang dan berada bawah administrasi pemerintahan Jepang, namun Tiongkok tetap mendeklarasikan bahwa kepulauan tersebut beserta wilayahnya merupakan milik Tiongkok dengan menggunakan dasar historis, lebih tepatnya pada masa kekuasaan Dinasti Qing. Pengakuan dengan dasar historis tersebut merupakan hal yang sulit untuk diterima karena Jepang telah melakukan okupasi terhadap Kepulauan Senkaku dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang berada di wilayahnya tanpa adanya protes dari pemerintahan Qing.⁸

Upaya Tiongkok untuk mengubah *status quo* dalam permasalahan teritorial Kepulauan Senkaku serta wilayahnya sudah berlangsung sejak lama. Tujuh tahun semenjak diberlakukannya Perjanjian San Francisco, Jepang mulai merasakan aktivitas-aktivitas Tiongkok dalam wilayah kepulauan tersebut. Pada awal tahun 1978, kapal-kapal penangkap ikan dibawah bendera Tiongkok menginfiltrasi wilayah perairan Kepulauan Senkaku untuk melakukan penangkapan ikan.⁹

Jepang mengatasi masalah tersebut dengan cara yang dapat dibilang cukup lunak, yaitu hanya memberikan peringatan kepada kapal-kapal tersebut bahwa wilayah perairan kepulauan tersebut berada dibawah administrasi Jepang, namun mendapatkan agresi dari pihak Tiongkok yang menodongkan senjata ke arah kapal

⁸ Koichi Sato. The Senkaku Islands Dispute: Four Reasons of the Chinese Offensive – a Japanese View. 2019. *Op cit.* 54

⁹ *Ibid.* hlm. 66

Penjaga Pesisir Jepang.¹⁰ Permasalahan tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak secara bilateral dan menggunakan jalur diplomasi, sehingga terbentuk perjanjian *Peace and Friendship* antar kedua negara, menyebabkan adanya redaman permasalahan teritorial tersebut selama lebih dari tiga dekade.¹¹

Permasalahan dalam perairan tersebut mulai memanas kembali pada tahun 2010 ketika sebuah kapal penangkap ikan Tiongkok melakukan penabrakan terhadap kapal penjaga pesisir Jepang.¹² Insiden penabrakan kapal penangkap ikan Tiongkok dengan kapal penjaga pesisir Jepang membuat keadaan internal domestik Tiongkok dan Jepang memanas karena adanya penangkapan kapten kapal Tiongkok oleh Jepang dan adanya kebocoran dari pihak Jepang terkait rekaman insiden tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk disiarkan ke publik.¹³ Berdasarkan video yang dibocorkan oleh seorang perwira penjaga pesisir Jepang¹⁴, aktor yang melakukan provokasi terlebih dahulu adalah kapal Tiongkok dengan sengaja menabrakkan kapalnya terhadap kapal penjaga pesisir Jepang.¹⁵

Lalu, selang dua tahun setelah insiden penabrakan kapal penjaga pesisir Jepang pada tahun 2010, permasalahan atas kedaulatan kepulauan tersebut kembali

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 68-69

¹² Reinhard Drifte, "The Senkaku/Diaoyu Islands Territorial Dispute between Japan and China: Between the Materialization of the `China Threat` and Japan `Reversing the Outcome of World War II`?," *UNISCI Discussion Papers*, no. 32 (April 4, 2014), https://doi.org/10.5209/rev_unis.2013.n32.44789.

¹³ Linus Hagstrom, "'Power Shift' in East Asia? A Critical Reappraisal of Narratives on the Diaoyu/Senkaku Islands Incident in 2010," *The Chinese Journal of International Politics* 5, no. 3 (August 26, 2012): 274, <https://doi.org/10.1093/cjip/pos011>.

¹⁴ Sheila A. Smith, "Japan and the East China Sea Dispute," *Orbis* 56, no. 3 (June 2012): 378, <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2012.05.006>.

¹⁵ Linus Hagstrom. Power Shift in East Asia? A Critical Reappraisal of Narratives on the Diaoyu/Senkaku Islands Incident in 2010. 2012. *op. cit.*

memanas ketika Jepang melakukan akuisisi terhadap 60% dari total pulau yang berada di dalam kepulauan tersebut.¹⁶ Walaupun secara Hukum Internasional daerah kepulauan tersebut merupakan daerah kepemilikan Jepang dikarenakan sejak abad ke-19 Jepang telah melakukan pemanfaatan atas wilayah tersebut, namun dalam domestik Tiongkok, terjadi protes besar akibat aksi yang dilakukan oleh pihak Jepang pada tahun 2012.¹⁷ Juga, di tahun yang sama Tiongkok melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan Jepang atas wilayah tersebut dengan melakukan pengintaian tanpa sepengetahuan Jepang di atas kepulauan Senkaku/Diaoyu.¹⁸

1.2.2 Pembatasan Masalah

Permasalahan kontestasi wilayah dalam sistem dunia yang ada pada masa kini kerap terjadi karena ketiadaan kekuatan yang mengatur cara negara-negara berhubungan satu dengan lainnya. Salah satu contoh nyata yang sampai sekarang masih berlangsung adalah kontestasi wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dengan Tiongkok. Tiongkok melakukan klaim terhadap wilayah tersebut atas dasar historis yang mereka miliki, lebih tepatnya Tiongkok pada saat berada di dalam kepemimpinan Dinasti Ming. Namun, klaim Jepang atas wilayah tersebut memiliki posisi yang lebih kuat dikarenakan mereka memang telah menempati dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya di dalam wilayah tersebut, juga sudah ada beberapa perjanjian yang mendeklarasikan bahwa Kepulauan Senkaku serta

¹⁶ Sheila A. Smith, "A Sino-Japanese Clash in the East China Sea," *Contingency Planning Memorandum*, no. 18 (April 2013): 1

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

wilayahnya merupakan milik Jepang. Isu utama yang ingin diperlihatkan di dalam penelitian ini adalah kebersikerasan Tiongkok akan perubahan *status quo* kepemilikan Kepulauan Senkaku beserta wilayahnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Jepang terus-menerus berusaha untuk mempertahankan kepemilikannya akan Kepulauan Senkaku serta wilayah sekitarnya, juga untuk terus mempertahankan kedaulatannya atas wilayah kepulauan tersebut. Penelitian akan fokus membahas akan strategi yang diambil oleh Jepang, lebih tepatnya sejak tahun 2012 untuk mempertahankan ancaman-ancaman yang mereka terus alami dalam perairan Kepulauan Senkaku dari Tiongkok yang terus menerus berupaya untuk mengubah keadaan saat ini.

Dalam permasalahan wilayah tersebut, aktor-aktor utama yang memiliki taruhan resiko terbesar adalah tentu saja Jepang dan Tiongkok. Namun, keterlibatan Amerika Serikat juga tidak dapat diabaikan dalam permasalahan wilayah Senkaku/Diaoyu. Keterlibatan Amerika Serikat di dalam permasalahan tersebut dapat dilihat melalui dua faktor, yaitu (1) adanya aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat terkait kebijakan proteksi Amerika Serikat terhadap negara-negara aliansinya dan (2) adanya nilai *Freedom of Navigation Operations* (FONOP) yang dianut oleh Amerika Serikat, seperti permasalahan yang dialami oleh negara tersebut dalam Laut Tiongkok Selatan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti berharap untuk menjawab pertanyaan penelitian: **Bagaimana**

strategi Jepang untuk mengamankan wilayah Kepulauan Senkaku dari ancaman Tiongkok?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibentuknya penelitian ini adalah, pertama untuk memperlihatkan dan menjelaskan perkembangan permasalahan teritorial yang terjadi di dalam wilayah Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Tiongkok, dan kedua adalah untuk menunjukkan adanya perubahan postur-postur pertahanan Jepang melalui strategi-strategi yang diambil oleh negara tersebut sejak adanya perubahan pola pikir dari para pengambil keputusan Jepang pada tahun 2012 kedepannya dalam merespon aktivitas-aktivitas Tiongkok di dalam wilayah Kepulauan Senkaku.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini akan melihat dari tiga sisi, yaitu (1) dalam bidang akademisi, penelitian diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang baru terkait permasalahan kontestasi wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu, (2) dalam praktisnya, penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki kemiripan topik penelitian, dan (3) bagi masyarakat umum, penelitian diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang dapat menjelaskan secara rinci terkait isu-isu utama dalam kontestasi wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Jepang terkait masalah tersebut.

1.4 KAJIAN LITERATUR

Penelitian mengenai strategi yang diambil oleh Jepang terhadap ancaman Tiongkok akan menggunakan tiga literatur sebagai pedoman penulis untuk menjelaskan keadaan Jepang dalam situasi terkini. Literatur pertama yang akan digunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Christopher W. Hughes berjudul *Japan's Response to China's Rise: Regional Engagement, Global Containment, Dangers of Collision*.¹⁹ Literatur pertama membahas tentang keadaan keamanan Jepang karena adanya peningkatan kapabilitas Tiongkok dalam beberapa faktor, yakni dalam faktor ekonomi dan faktor kapabilitas militer yang dimiliki oleh Tiongkok.

Dilema yang dimiliki oleh Jepang pada saat ini terhadap Tiongkok adalah karena adanya peningkatan ekonomi yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan kapabilitas militer negara tersebut, terutama terhadap angkatan laut yang Tiongkok miliki. Para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan Jepang memiliki ketakutan akan pesatnya pertumbuhan angkatan laut Tiongkok disebabkan oleh adanya banyak perubahan alutsista angkatan laut negara tersebut yang sudah semakin modern.²⁰ Ketakutan yang dimiliki oleh para pengambil keputusan dalam Jepang dibuktikan dengan banyaknya pengalokasian dana pemerintah Tiongkok ke dalam anggaran pertahanan mereka yang juga dipengaruhi dengan sistem pemerintahan negara Tiongkok.

¹⁹ Christopher Hughes, "Japan's Response to China's Rise: Regional Engagement, Global Containment, Dangers of Collision," *International Affairs*, vol. 85, no. 4, 2009, 837-856

²⁰ *Ibid.* 841

Dalam prakteknya, Tiongkok terkenal bukan merupakan negara yang terbuka terkait pengambilan dan pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang telah mereka buat. Dengan sistem satu partai yang dimiliki oleh Tiongkok, dan semua keputusan berada di tangan presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut, sulit untuk menentukan intensi nyata dari adanya peningkatan militer yang Tiongkok jalankan. Ketakutan Jepang juga memiliki alasan yang konkrit terhadap peningkatan kapabilitas angkatan laut Tiongkok, yaitu dengan mulai adanya aksi Tiongkok yang merendahkan kedaulatan Jepang sebagai sebuah negara. Buktinya adalah tingginya intensitas kapal – kapal riset dan perang Tiongkok yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, terutama di wilayah kepulauan Senkaku/ Diaoyu.

Literatur kedua yang akan digunakan penulis sebagai pedoman untuk meneliti kasus dilema pertahanan Jepang berjudul *Protecting the Status Quo: Japan's Response to the Rise of China* yang merupakan sebuah bagian dalam buku *Strategic Adjustment and The Rise of China: Power and Politics in East Asia*.²¹ Dalam bagian tersebut, Bowers dan Gronning menjelaskan secara lebih mendalam tentang posisi dan intensi Tiongkok yang sedang meningkatkan kapabilitas militernya, terutama dalam kapabilitas angkatan laut. Para penulis memberikan argumen bahwa dengan pesatnya perkembangan ekonomi yang Tiongkok sedang

²¹ Ian Bowers dan Bjorn Elias Mikalsen Gronning, "Protecting the Status Quo: Japan's Response to the Rise of China," *Strategic Adjustment and The Rise of China: Power and Politics in East Asia*, ed. Robert Ross & Oystein Tunsjo (Ithaca and London: Cornell University Press, 2017), 137-168

alami, negara tersebut juga memberikan fokus terhadap perkembangan angkatan lautnya.

Bowers dan Gronning memberikan penjelasan bahwa keamanan dan kestabilan wilayah maritim Jepang sedang mengalami gangguan dikarenakan pesatnya pertumbuhan angkatan laut Tiongkok dan juga cara Tiongkok memanfaatkan perkembangan tersebut dalam wilayah Laut Tiongkok Timur dan Selatan. Melihat aktivitas angkatan laut Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan menggunakan superioritas angkatan lautnya untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut, Jepang mengambil kesimpulan bahwa Tiongkok bermain dengan cara kotor dan tidak mengindahkan aturan – aturan internasional. Dalam bagian ini, para penulis juga menjelaskan ketakutan Jepang dikarenakan meningkatnya aktivitas kapal – kapal asal Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Timur, dengan juga melihat aktivitas – aktivitas Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Selain menjelaskan posisi dan intensi Tiongkok, para penulis dalam bagian ini juga menjelaskan peningkatan – peningkatan alutsista yang sedang dilakukan oleh Tiongkok secara cukup dalam. Bowers dan Gronning memaparkan peningkatan – peningkatan alutsista negara tersebut dengan memberikan beberapa perlengkapan yang dimiliki oleh angkatan laut Tiongkok. Bowers dan Gronning memberikan argumen bahwa peralatan – peralatan yang sedang dikembangkan oleh Angkatan Laut Tiongkok tersebut masuk ke dalam kategori persenjataan yang dapat digunakan untuk menangkal pasukan Jepang masuk ke dalam wilayah Laut Tiongkok Timur, terutama wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Literatur ketiga yang akan digunakan sebagai acuan dari penelitian ini adalah *The Rise of China and Japan's Balancing Strategy: Critical Junctures and Policy Shifts in the 2010s*.²² Dalam jurnal tersebut, Koga menjelaskan tentang permasalahan yang Jepang alami dikarenakan peningkatan kekuatan Tiongkok, serta menjelaskan progres perubahan kebijakan-kebijakan yang Jepang ambil untuk mengatasi ancaman dari Tiongkok. Penulis menekankan strategi yang Jepang ambil untuk mengatasi ancaman Tiongkok dengan melakukan strategi *balancing* baik secara internal maupun eksternal. Jurnal tersebut membahas strategi yang diambil sejak bentrokan pertama antara kedua negara, yaitu pada tahun 1978 yang berlanjut sampai kepada abad 21.

Jurnal tersebut juga menjelaskan lebih dalam terkait keadaan pertahanan Jepang yang awalnya sangat bergantung kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan keamanan negaranya beralih ke dalam strategi *balancing* eksternal, terutama kepada negara-negara dalam region tersebut. Negara-negara dalam region tersebut antara lain adalah Australia dan India. Pada tahun 2006, Jepang dengan India membentuk kooperasi pertahanan yang dinamakan dengan *Strategic and Global Partnership*. Lalu, pada tahun 2007, Jepang dengan Australia membentuk sebuah kooperasi pertahanan yang dinamakan *Joint Declaration on Security Cooperation*.

²² Kei Koga, "The Rise of China and Japan's Balancing Strategy: Critical Junctures and Policy Shifts in the 2010s," *Journal of Contemporary China* 25, no. 101 (April 18, 2016): 777–91, <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1160520>.

Selanjutnya, Koga juga menekankan perubahan fokus Jepang untuk meningkatkan pertahanannya yang diakibatkan oleh fenomena penabrakan kapal oleh Tiongkok pada tahun 2010 di perairan Senkaku. Permasalahan tersebut diperparah dengan beberapa aksi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk dalam retaliasi terkait penangkapan kapten kapal penangkap ikan tersebut. Lalu, pada tahun 2012 Tiongkok kembali memperkeruh masalah dengan melakukan pelayaran di perairan Senkaku dengan intensitas yang cukup tinggi. Aksi tersebut merupakan perlawanan Tiongkok akan Jepang yang melakukan pembelian pulau-pulau yang berada di Kepulauan Senkaku. Pada tahun 2013, Jepang mulai merubah postur pertahanan mereka diperlihatkan oleh perubahan kebijakan keamanan pada tahun 2013 dalam NDPG dan NSS negara tersebut.

Literatur terakhir yang akan dipakai dalam penelitian ini memiliki judul *China's Strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: Issue Linkage and Coercive Diplomacy*.²³ Jurnal tersebut memiliki fokus terhadap pemanfaatan permasalahan teritorial tersebut sebagai salah satu strategi Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Wiegand dalam jurnal tersebut memberikan sebuah argumen bahwa Tiongkok terus-menerus memperpanjang permasalahan tersebut dan tidak ingin menyelesaikannya dalam waktu dekat karena adanya kepentingan selain dari adanya kepentingan akan pemenuhan kebutuhan akan energi, yaitu sumberdaya minyak dan gas mentah,.

²³ Krista Wiegand, "China's Strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: Issue Linkage and Coercive Diplomacy," *Asian Security*, vol. 5, no. 2 (2009): 170-193, <https://doi.org/10.1080/14799850902886617>

Kebutuhan lainnya tersebut berada dalam sektor politik, yaitu sebagai salah satu alat negosiasi Tiongkok terhadap permasalahan-permasalahan lain terhadap Jepang. Tiongkok menggunakan permasalahan teritorial untuk mendapatkan kelonggaran dari Jepang terkait kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Jurnal tersebut memberikan argumen bahwa Tiongkok mengaitkan permasalahan teritorial wilayah Kepulauan Senkaku dengan permasalahan-permasalahan lainnya sehingga Tiongkok dapat memberikan efek koersif kepada Jepang, mengakibatkan Tiongkok memiliki kekuatan lebih dalam bernegosiasi. Melalui jurnal tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tiongkok mengkonversi kekuatan militer yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan untuk berdiplomasi, lebih tepatnya untuk memaksakan kehendaknya kepada Jepang.

Beranjak dari literatur-literatur yang telah dijabarkan di atas, penelitian akan mengacu kepada literatur-literatur yang berargumen akan strategi-strategi yang diambil oleh Jepang untuk mengatasi ancaman dari Tiongkok. Selibuhnya, penelitian ini akan memiliki fokus untuk menjabarkan dan menganalisis strategi yang Jepang ambil secara lebih mendalam, terutama dalam area pertahanan maritim negara tersebut melalui beberapa tahap yang akan dijelaskan di dalam bagian analisis dari penelitian.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Maritime Strategy in Peacetime

Penelitian tentang strategi Jepang untuk menangani ancaman Tiongkok, terutama dalam wilayah Kepulauan Senkaku serta wilayah di sekitarnya akan

menggunakan sebuah pemikiran yang dikemukakan oleh Dr. Milan Vego, seorang profesor dari *Naval War College*. Beliau mendefinisikan strategi maritim sebagai sebuah seni yang digunakan oleh sebuah negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melalui aktivitas-aktivitas maritim yang mempengaruhi keamanan nasional sebuah negara.²⁴

Dalam buku dengan judul *Maritime Strategy and Sea Denial: Theory and Practice*, Beliau memaparkan strategi-strategi yang sebaiknya diambil oleh sebuah negara dalam keadaan damai maupun keadaan peperangan. Tulisan tersebut lebih fokus membahas terkait strategi yang harus diambil oleh sebuah negara jika negara tersebut memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan lawannya.

Vego menekankan dalam tulisan yang Beliau kemukakan bahwa sebuah negara yang memiliki kekuatan lebih lemah akan cenderung untuk mengadopsi strategi defensif, namun jika kesempatan memungkinkan, maka negara tersebut dapat merubah strateginya menjadi ofensif. Kesempatan tersebut pun harus diikuti dengan adanya beberapa perhitungan, yakni letak geografis yang strategis, faktor internal dari angkatan laut yang dimilikinya (mentalitas komandan dan personel), dan kapabilitas angkatan laut tersebut. Oleh karena itu, jika sebuah negara dengan kekuatan lebih kecil ingin mengadopsi strategi ofensif, negara tersebut harus memperhitungkan poin-poin terdahulu.

Dengan argumen diatas, maka Vego memaparkan tujuh elemen utama dalam memperhitungkan strategi maritim di kala keadaan damai, yakni (1)

²⁴ Milan Vego, *Naval Strategy and Operations in Narrow Seas*, ed. 2 (1999; repr., London: FRANK CASS, 2003), 1-2.

menentukan prioritas utama dan sekunder, (2) menentukan strategi objektif, (3) menyebar kekuatan maritim dalam teritori, (4) mempertahankan/memperkuat posisi strategi maritim, (5) memperhitungkan kekuatan/komposisi angkatan laut negara, (6) memperhitungkan kemungkinan terjadinya bentrokan maritim, (7) mempertahankan/membentuk aliansi.²⁵

Selanjutnya, penjelasan lebih rinci dari poin-poin tersebut, adalah sebagai berikut (1) sebuah negara harus menentukan objektif yang merupakan prioritas dari negara tersebut, (2) negara harus menentukan strategi yang diambil demi mempertahankan objektif tersebut (ofensif/defensif), (3) negara harus dapat menyebar kekuatan maritimnya agar efektif dalam melakukan operasi, (4) negara harus menganalisis apakah persebaran yang telah dilakukan berada dalam letak strategis, (5) negara harus memperhitungkan kekuatan yang dimilikinya sehingga dapat mengambil strategi lanjutan untuk menahan agresi dari pihak lawan, (6) negara harus menyesuaikan strategi yang telah dimiliki terhadap akan adanya kemungkinan terjadinya bentrokan di masa-masa kedepan, (7) negara yang lebih lemah harus menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk mengimbangi kekuatannya dengan pihak lawan.²⁶

Melalui pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Milan Vego, terlihat bahwa pemikiran tersebut dapat digunakan untuk menganalisis strategi yang sebaiknya diambil oleh Jepang untuk menangani ancaman oleh

²⁵ Milan Vego, *Maritime Strategy and Sea Denial: Theory and Practice*, ed. 1 (London: Routledge, 2019): 4

²⁶ *Ibid.* 1-311

Tiongkok karena perbedaan yang cukup signifikan dalam kapabilitas maupun kekuatan angkatan laut yang dimiliki antar kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Beliau dalam menganalisis strategi yang diambil oleh Jepang terkait permasalahan teritorial Kepulauan Senkaku.

1.5.2 Konsep Ancaman Stephen M. Walt

Dalam bukunya *The Origins of Alliances*, Walt memberikan sebuah konsep ancaman yang dapat diberikan oleh sebuah negara kepada negara lainnya melalui beberapa indikator, yaitu kekuatan agregat, letak geografis, kapabilitas militer, dan intensi yang dimiliki oleh sebuah negara.²⁷ Pertama, kekuatan agregat yang dimaksud dalam konsep ancaman Walt adalah keseluruhan aset yang dimiliki oleh sebuah negara, yaitu seperti total populasi, sumber daya, ekonomi, teknologi, dll. Kedua, letak geografis antar negara bersangkutan. Ia memiliki argumen bahwa ancaman yang diberikan sebuah negara kepada negara lainnya memiliki pengaruh terhadap letak geografis keduanya, semakin dekat jarak di antara mereka, maka ancaman yang ditimbulkan akan semakin besar, dan *vice versa*. Selanjutnya, kapabilitas militer yang dimiliki oleh sebuah negara. Jika sebuah negara memiliki kapabilitas militer untuk mengganggu kedaulatan dari negara lainnya dengan *cost < gains*, maka semakin besar ancaman negara tersebut terhadap negara tetangganya.²⁸ Indikator terakhir adalah intensi dari sebuah negara. Semakin besar ambisi sebuah negara untuk mengubah *status quo* yang telah ditetapkan sejak waktu yang lama

²⁷ Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987): 22

²⁸ *Ibid.* 24

terhadap sebuah wilayah/teritori negara lain, maka ancaman yang ditimbulkan oleh negara tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya yang tidak memiliki ambisi tersebut.

1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan fokus melihat kebijakan – kebijakan dan perjanjian – perjanjian yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang dalam merespon perkembangan angkatan laut Tiongkok. Menganalisis dari kasus – kasus yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Timur, terutama dalam wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu akibat aksi – aksi yang dilakukan oleh Tiongkok. Penelitian akan dilakukan menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dikemukakan oleh John Creswell. Ia menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif studi kasus adalah sebuah metodologi yang mengharuskan peneliti untuk mencari kasus – kasus yang terjadi terhadap objek yang diteliti melalui sumber – sumber yang telah disediakan (observasi, wawancara, materi audiovisual, dan dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan resmi).²⁹ Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Creswell, maka peneliti akan mengelaborasi penelitian dengan melakukan observasi terhadap perkembangan kasus – kasus di wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

²⁹ John W. Creswell, “Case Study research”, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, edisi ke-2 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007), 73-75

Penelitian akan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data sekunder untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian terkait respon Jepang terhadap peningkatan kapabilitas Angkatan Laut Tiongkok.³⁰ Pengumpulan data akan menggunakan jurnal – jurnal terdahulu sebagai pedoman utama penelitian, *website* resmi dari pemerintahan, artikel – artikel yang dikeluarkan oleh media – media ternama, dan pertemuan – pertemuan pers yang dilakukan oleh pemerintah.³¹

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian akan dilakukan secara sistematis melalui empat bab. **Bab I** membahas tentang latar belakang dan identifikasi masalah terkait masalah teritorial yang sedang dialami oleh Jepang dan Tiongkok di Kepulauan Senkaku dan wilayah sekitarnya. **Bab II** akan membahas secara lebih rinci terkait kebijakan luar negeri Jepang, kepemilikan Kepulauan Senkaku serta wilayah sekitarnya, kekuatan dan kapabilitas Tiongkok, dan argumen Tiongkok terkait pendeklarasian kedaulatan Tiongkok akan Kepulauan Senkaku. **Bab III** akan membahas strategi Jepang untuk mempertahankan kedaulatannya atas Kepulauan Senkaku serta wilayah sekitarnya, dan juga mengamankan wilayah tersebut dari ancaman Tiongkok. **Bab IV** akan digunakan untuk menyimpulkan dan menutup keseluruhan hasil penelitian.

³⁰ Robert Miller dan John Brewer, “Secondary Data Analysis”, *The A-Z of Social research* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2003), 285-287

³¹ Joop Hox dan Hennie Boeije, “Data Collection: Primary vs. Secondary,” *Encyclopedia of Social Measurement*, 2005, 596-598, doi: 10.1016/B0-12-369398-5/00041-4

